



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

BADAN LAYANAN UMUM

BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

JALAN RAYA SETU, CIBUNTU,
CIBITUNG, BEKASI JAWA BARAT
17520

TELP. FAX

: 8253352

: 8253353

EMAIL

: bpljskb@kemenhub.go.id

WEBSITE

: hubdat.dephub.go.id/id/bptd/bpljskb

NOTA DINAS

Nomor : 189/TU/VIII/2026

Kepada : Kepala Balai PLJSKB
Dari : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
Perihal : Laporan Penyuluhan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2026
Tanggal : 7 Agustus 2026

Menindaklanjuti Surat Undangan yang diterbitkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku Manajer Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor UM.207/59/5/DJPD/2026 tanggal 29 Juli 2026 perihal Undangan Penyuluhan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2026, dengan ini kami sampaikan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyuluhan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2026 dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Agustus 2026 melalui *video conference* Zoom Meeting.
2. Kegiatan dibuka pukul 09.30 yang dibuka oleh Bapak Herman Wibowo selaku Ketua Tim Humas Ditjen Perhubungan Darat, dimana kegiatan dihadiri oleh Tiim Humas BPLJSKB.
3. Beberapa hal yang disampaikan dalam kegiatan tersebut sebagai berikut:

A. Sambutan dari Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub

- 1) Ibu Farida Mahmudah selaku Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik menekankan pentingnya pemutakhiran website sebagai "rumah" informasi publik, kewajiban ASN untuk menyampaikan informasi akurat dan bertanggung jawab, serta peran humas/PPID dalam mendorong partisipasi publik dan keselamatan transportasi.

B. Penyampaian Paparan Utama oleh Ibu Mia Ermaya

- 1) Tahun 2026, metode MONEV disebut akan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pendekatannya tidak lagi sama seperti model sebelumnya yang lebih luas, melainkan lebih fokus pada bidang tertentu;
- 2) Disebutkan bahwa karena jumlah BLU semakin banyak dan ada pertimbangan efisiensi, tidak semua BLU akan didatangi langsung secara luring;

- 3) Monitoring tetap akan dilakukan, termasuk melalui pendekatan online, kolektif, dan sharing knowledge antara pembina keuangan dan pembina teknis.

C. Temuan Evaluasi AKIP 2025

- 1) Dirjen Perhubungan Darat: nilai 96,1 (Informatif) pada 2025, peringkat ke-4 di antara PPID Pelaksana Kemenhub;
- 2) Terdapat 4 UPT/BPTD berstatus Informatif: BPTD Kelas I Jawa Barat, BPTD Sumatera Barat, Balai Pengujian BPLJSKB, BPTD Jambi;
- 3) 7 UPT berstatus Menuju Informatif diantaranya BPTD Kelas II Bali, DIY, Kalsel, Riau, Lampung, Kaltara, Sumut;
- 4) 10 UPT berstatus Cukup Informatif;
- 5) 5 UPT berstatus Kurang Informatif, yaitu BPTD Maluku Utara, NTT, Sumsel, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau. Kendala utamanya adalah dokumen pengadaan barang & jasa (Barjas) banyak tidak dilampirkan (nilai nol untuk beberapa item);
- 6) 10 UPT berstatus Tidak Informatif (beberapa ada nilai nol penuh).

D. Penyebab Penurunan Poin

- 1) Pembina Aksesibilitas ramah difabel belum optimal (layout, lokasi menu, atau fitur);
- 2) Informasi berkala terkait pengadaan barang/jasa tidak dilampirkan atau tidak sesuai bukti dukung (38 item Barjas yang diminta belum terpenuhi);
- 3) Pemutakhiran website tidak konsisten: banyak konten masih tahun-tahun sebelumnya (2022–2024), menu PPID tidak tampil jelas di halaman utama atau tautan masih mengarahkan ke media sosial;
- 4) Formulir permohonan, register, maklumat layanan, SOP, struktur organisasi PPID, nomor kontak/ hotline aktif, dan alur sengketa belum komprehensif atau tidak dipublikasikan;
- 5) Bukti-bukti rapat FGD/pembinaan internal belum cukup dilampirkan.

E. Tindak Lanjut

- 1) Segera lakukan pemutakhiran website dan pengaturan menu PPID di halaman utama (prioritas: informasi berkala & formulir permohonan online).
- 2) Humas Dirjen Darat memfasilitasi komunikasi dengan Ortala/Tim IT untuk:
 - Memperbaiki akses (user/password) bagi admin UPT;
 - Menyediakan tutorial/pendampingan upload dokumen dan pembuatan sub-menu.
- 3) Setiap UPT/BPTD:
 - Menyusun/menyempurnakan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan, serta mengirimkan usulan ke PPID Pelaksana untuk

- Melengkapi dokumen Barjas (atau surat pernyataan) dan bukti-bukti pelaporan (laporan tahunan, RKA, laporan keuangan, LHKPN pimpinan).
- 4) Biro KIP / Tim AKIP:
- Menyediakan panduan contoh template (maklumat pelayanan, SOP, formulir permohonan, register) yang dapat diadopsi dan ditandatangani oleh kepala UPT;
 - Menyelenggarakan coaching/klinik teknis lanjutan dan pembinaan untuk UPT yang berstatus Kurang Informatif/Tidak Informatif sebelum penilaian akhir akhir Agustus 2026.
- 5) Peserta diminta meng-capture bukti keikutsertaan forum/FGD/pembinaan dan foto fasilitas layanan (meja layanan, banner, formulir cetak) untuk lampiran bukti AKIP.

F. Kesimpulan

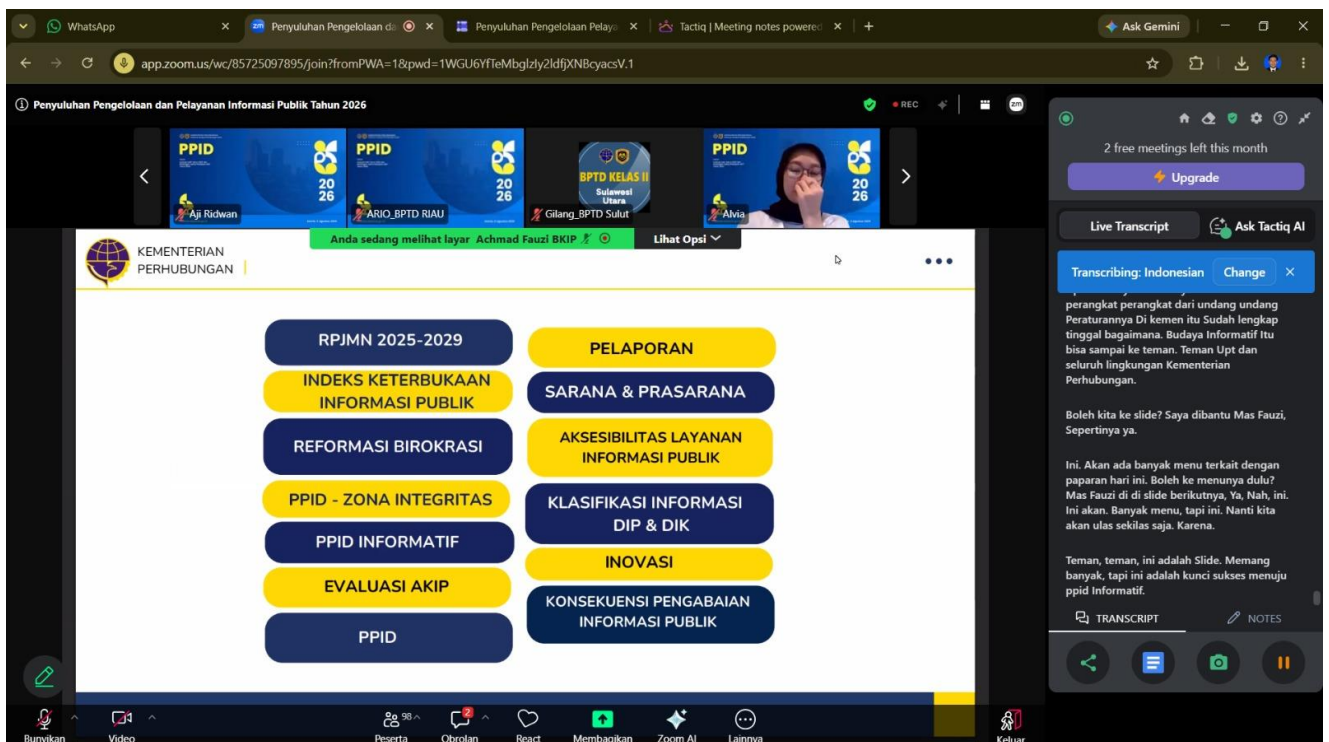
Dari kegiatan dimaksud dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan atau meningkatkan predikat “Informatif” memerlukan komitmen pimpinan, konsistensi pemutakhiran informasi berkala dan sinergi operasional antara PPID, Humas, dan IT/Ortala.
- 2) Persiapan akhir untuk AKIP 2026 diprioritaskan di akhir Agustus 2026, semua UPT/BPTD diminta mempercepat pemutakhiran dan koordinasi teknis sebelum penilaian.
- 3) Peserta dianjurkan menghubungi tim humas Dirjen Darat untuk penanganan akses website, bantuan tutorial, dan koordinasi pelaporan.



Santri Aang Amin Abidin, S.T., M.MTr
NIP. 19830106 200712 1 004

DOKUMENTASI KEGIATAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).